



DHIAN NOVITASARI, FRAKSI PARTAI GERINDRA

Jalankan Fungsi Budgeting, Tegas Kawal Anggaran



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar Jumat (13/6) kemarin berjalan dinamis. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogya Dhan Novitasari menjadi salah satu yang secara tegas mengawal proses penganggaran demi menjalankan fungsi budgeting.

Pada kesempatan itu Dhan menyoroti sejumlah program dalam rencana APBD Perubahan 2025 yang tidak sesuai dengan pembahasan sebelumnya. "Beberapa program strategis walikota yang tertuang dalam ekspose RPJMD justru tidak menjawab prioritas pembangunan dalam konteks kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Program prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan, ketimpangan dan kemiskinan seperti Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dan Bapak Asuh Keluarga Miskin hanya diturunkan menjadi program pember-

dayaan sosial oleh OPD terkait. Seharusnya pemerintah lebih berkon-sentrasi pada upaya pengentasan permasalahan tersebut. Namun pada paparan ekspose RPJMD justru pemerintah banyak memfokuskan program kepada urusan kesehatan dan seolah mengesampingkan permasalahan kemiskinan sebagai pangkal dari masalah kesehatan.

Selain ketidakselarasan permasalahan dan upaya pengentasannya, anggaran belanja pegawai juga melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari kesimpulan usulan Banggar terhadap pembahasan Raperda APBD 2025 pada 28 November 2024 disampaikan belanja wajib minimal 40% dari total APBD di-alokasikan untuk infrastruktur publik, dan maksimal 30% untuk belanja pegawai di luar tun-

jangan khusus seperti guru.

Akan tetapi, imbuh Dhan, dalam draft KUAPPS 2025 justru terjadi peningkatan belanja pegawai mencapai 39,71% dari APBD. Begitu pula belanja di sektor lain yang nominalnya justru terjadi perubahan dari yang sudah dibahas bersama. "Fokus pembangunan seperti yang sudah dijabarkan oleh walikota kan pada aspek pengentasan kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Tetapi peningkatan belanja dalam perubahan APBD 2025 justru tidak ada kolerasinya. Kita harus hati-hati terhadap angka-angka karena itu nanti bisa berdampak pada kegiatan yang seharusnya menjadi kemaslahatan masyarakat banyak," tegasnya.

Alhasil, rapat yang digelar kemarin berjalan dinamis dan belum bisa membuahakan keputusan final.

Agenda persetujuan bersama atas perubahan KUAPPAS 2025 yang sedianya dijadwalkan kemarin juga akhirnya ditunda. Kritik dan masukan yang dilontarkan Dhan pun menjadi perhatian bersama. "Argumen saya mengkritisi terkait hal anggaran karena kapasitas saya berada di Banggar serta berharap roh pelayanan publik yang sudah disampaikan melalui RPJMD ke RKPD benar-benar menyelesaikan PR pelayanan publik yang serius dan konkrit," tandasnya. (Dhi) -f



KR-istimewa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005